



**Mohamad Davit Triandi**  
**Priatna<sup>1</sup>**  
**Nandito Fahrelabarni<sup>2</sup>**  
**Ijlaal Wiryateja<sup>3</sup>**  
**Muhammad Hudzaifah<sup>4</sup>**  
**Justin Nabil Alpasha<sup>5</sup>**  
**Rudiana<sup>6</sup>**

## **IMPLEMENTASI SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES DI KOTA CIMAHI MELALUI STUDI PADA SEKTOR PERMUKIMAN**

### **Abstrak**

Analisis terhadap implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 11 pada sektor permukiman di Kota Cimahi berfokus pada indikator 11.1 terkait penyediaan hunian layak dan penanganan kawasan kumuh. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif digunakan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta telaah dokumen resmi seperti RP3KP dan regulasi terkait permukiman. Proses analisis mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman serta teori implementasi kebijakan George C. Edwards III sebagai dasar untuk menilai efektivitas aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Temuan menunjukkan bahwa upaya pencapaian SDGs 11 pada sektor permukiman di Kota Cimahi berjalan cukup efektif. Hal ini tercermin dari penurunan luas kawasan kumuh dalam beberapa tahun terakhir dan kemunculan berbagai inovasi, seperti program Rutilahu, Cimahi Luis Bebas Kumuh (CLBK), serta pengembangan ruang hijau kawasan. Kemajuan tersebut didukung oleh koordinasi kelembagaan yang lebih terarah, keterlibatan masyarakat yang kuat, serta disposisi pelaksana yang adaptif dalam mengatasi keterbatasan lahan dan sumber daya. Implementasi yang solid pada sektor permukiman menunjukkan pentingnya tata kelola yang terintegrasi untuk mendorong terwujudnya kota yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Sdgs 11, Permukiman, Implementasi Kebijakan, Kawasan Kumuh, Kota Cimahi.

### **Abstract**

This analysis of the implementation of Sustainable Development Goal (SDG) 11 in the organizational sector in Cimahi City focuses on indicator 11.1 related to the provision of adequate housing and slum management. A qualitative approach with descriptive methods was used through in-depth interviews, field observations, and a review of official documents such as the RP3KP and organizational regulations. The process analysis refers to the interactive model of Miles and Huberman and the policy implementation theory of George C. Edwards III as a basis for assessing the effectiveness of aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that efforts to achieve SDG 11 in the organizational sector in Cimahi City have been quite effective. This is reflected in the reduction of slum areas in recent years and the emergence of various innovations, such as the Rutilahu program, Cimahi Luis Bebas Kumuh (CLBK), and the development of regional green spaces. This progress is supported by more focused institutional coordination, strong community involvement, and adaptive implementing dispositions in overcoming land and resource limitations. Solid implementation in the organizational sector demonstrates the importance of integrated governance to promote the realization of an inclusive, safe, and sustainable city.

**Keywords:** Sdgs 11, Settlements, Policy Implementation, Slum Areas, Cimahi City.

<sup>1,2,3,4,5,6)</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Padjadjaran  
 email: mohamad24002@mail.unpad.ac.id, nanditoabarni@gmail.com, ijlaal.w@gmail.com,  
 muhammad24008@mail.unpad.ac.id, justin23004@mail.unpad.ac.id, rudiana2017@unpad.ac.id

## PENDAHULUAN

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan komitmen global yang lahir dari kesepakatan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (United Nations, 2015). Dari 17 tujuan yang ditetapkan, SDG 11 tentang Sustainable Cities and Communities menjadi salah satu fokus penting mengingat semakin meningkatnya urbanisasi di negara berkembang. Tujuan ini menekankan pentingnya penyediaan permukiman layak, aman, terjangkau, serta transportasi umum yang berkelanjutan sebagai fondasi kehidupan kota modern.

Komitmen Indonesia terhadap SDGs ditunjukkan melalui keluarnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yang menjadi pedoman nasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Namun, implementasi SDGs pada konteks perkotaan tidaklah sederhana. Kota-kota di Indonesia menghadapi tekanan berupa pertumbuhan penduduk yang tinggi, keterbatasan infrastruktur dasar, hingga persoalan ketimpangan akses terhadap layanan publik seperti hunian dan transportasi (Kementerian PPN/Bappenas, 2017). Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk merumuskan strategi yang tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif terhadap perubahan demografis dan spasial.

Kota Cimahi, sebagai kota dengan luas wilayah hanya 42,43 km<sup>2</sup> dan bagian dari kawasan Metropolitan Bandung Raya, menghadapi tekanan urbanisasi yang cukup signifikan. Kepadatan penduduk yang tinggi serta keterbatasan ruang perkotaan menjadikan isu permukiman sebagai salah satu persoalan fundamental. Fenomena ini berkaitan erat dengan capaian indikator SDGs 11.1 tentang Safe and Affordable Housing, yang menekankan pentingnya ketersediaan hunian yang layak bagi seluruh warga.

Pertumbuhan permukiman padat di Cimahi berpotensi mendorong munculnya kawasan kumuh, terutama karena masyarakat terpaksa memanfaatkan lahan yang tidak sesuai peruntukannya. Kondisi ini berdampak pada kualitas sanitasi, daya dukung lingkungan, serta keselamatan bangunan (DKPKP Cimahi, 2023). Meski Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menjalankan berbagai program seperti perbaikan rumah tidak layak huni dan penataan kawasan, implementasinya masih menghadapi tantangan teknis, sosial, dan administratif, termasuk keterbatasan anggaran dan dinamika sosial masyarakat (Putri & Rahmawati, 2021).

Selain sektor permukiman, Kota Cimahi juga berkaitan dengan indikator SDGs 11.2 mengenai penyediaan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Sebagai kota komuter, mobilitas masyarakat tiap hari sangat tinggi, namun hal ini tidak sebanding dengan kapasitas dan kualitas transportasi umum yang ada. Akibatnya, penggunaan kendaraan pribadi meningkat, memicu kemacetan, polusi, dan menurunnya kenyamanan mobilitas penduduk (Dishub Cimahi, 2022). Meski demikian, fokus penelitian ini dipersempit pada sektor permukiman karena sektor tersebut merupakan fondasi utama keberlanjutan ruang kota.

Melihat kompleksitas tersebut, implementasi SDG 11 di Kota Cimahi membutuhkan kajian yang lebih mendalam, khususnya terkait bagaimana kebijakan permukiman dirancang dan dijalankan oleh pemerintah daerah. Implementasi kebijakan pada tingkat lokal sering kali dipengaruhi oleh kapasitas birokrasi, koordinasi lintas sektor, serta responsivitas program terhadap kebutuhan masyarakat setempat (Howlett & Ramesh, 2014). Analisis terhadap implementasi SDGs 11.1 pada sektor permukiman memungkinkan adanya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan yang berjalan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menelaah implementasi SDG 11 di Kota Cimahi melalui studi pada sektor permukiman. Penelitian ini bertujuan menggambarkan efektivitas program hunian layak, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pemerintah, serta menggali persepsi masyarakat terkait kondisi permukiman yang mereka alami. Dengan demikian, kajian ini diharapkan mampu memberikan wawasan empiris mengenai bagaimana komitmen global Sustainable Cities and Communities diterjemahkan ke dalam kebijakan lokal, serta menawarkan rekomendasi strategis bagi penguatan pembangunan permukiman berkelanjutan di Kota Cimahi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami bagaimana Pemerintah Kota Cimahi mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) khususnya tujuan 11 mengenai kota dan permukiman berkelanjutan. Fokus penelitian diarahkan pada indikator 11.1 tentang akses hunian layak dan penanganan kawasan kumuh, dengan objek kajian pada kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat DPKP, ketua RW, dan masyarakat penerima program, serta observasi lapangan di kawasan permukiman padat seperti RW 04 untuk melihat langsung kondisi hunian dan intervensi pemerintah. Dokumen program, laporan kinerja, dan regulasi terkait SDGs turut digunakan untuk memperkuat analisis.

Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data yang telah disederhanakan kemudian disusun dalam narasi sistematis untuk mengidentifikasi pola implementasi, termasuk aspek komunikasi, koordinasi antaraktor, serta keterbatasan sumber daya lahan dan anggaran. Tahap verifikasi dilakukan secara berulang untuk memastikan konsistensi temuan dan kesesuaian dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Melalui proses ini, penelitian memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas implementasi Sustainable Cities and Communities pada sektor permukiman di Kota Cimahi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Cimahi merupakan kota dengan posisi strategis di dalam Metropolitan Bandung Raya. Dengan luas wilayah sekitar 42,43 km<sup>2</sup>. Cimahi termasuk salah satu kota dengan luasan terkecil di Jawa Barat, namun memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Kondisi ini menyebabkan tekanan terhadap ketersediaan ruang, khususnya untuk pengembangan permukiman dan pelayanan transportasi. Struktur ruang Kota Cimahi didominasi oleh kawasan militer dan industri, yang membatasi ruang yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan permukiman baru maupun fasilitas publik. Keterbatasan lahan tersebut berdampak pada munculnya kawasan permukiman padat serta menantang pemerintah kota dalam memastikan kualitas infrastruktur dasar yang memadai.

Kecamatan dan Kota	Luas Wilayah Kota Cimahi (Km2)	
	2022	
Cimahi Selatan		17,41
Cimahi Tengah		10,89
Cimahi Utara		14,13
Kota Cimahi		42,43

Gambar 1. Luas Wilayah Kota Cimahi

Sumber: BPS Kota Cimahi (2022)

Dari sisi mobilitas, Cimahi juga menjadi kawasan perlintasan utama bagi aktivitas komuter menuju Kota Bandung. Hal ini meningkatkan kebutuhan akan layanan transportasi umum yang lebih teratur, terintegrasi, dan layak guna mendukung pergerakan masyarakat. Namun, kepadatan ruang terbangun membuat perluasan infrastruktur transportasi tidak selalu mudah dilakukan. Secara keseluruhan, karakteristik geografis dan demografis Kota Cimahi menjadi konteks penting dalam menganalisis implementasi SDGs 11, khususnya terkait penyediaan permukiman layak huni dan pengembangan transportasi berkelanjutan. Kondisi ini memberikan dasar pemahaman terhadap tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mewujudkan kota yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Makna/Description	Satuan/Unit	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>SOSIAL/SOCIAL</b>				
Penduduk /'Population'	jiwa/people	582.646	590.782	598.698
Laju Pertumbuhan Penduduk /'Population Growth'	%	1,43	1,40	1,39
Angka Harapan Hidup/-e, /Life Expectancy Rate'	tahun/year	74,99	75,27	75,55
Angka Miskin Hidup Usia 15+ /'Poverty Rate Aged 15+'	%	99,84	99,84	99,71
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPA'	%	67,22	68,43	66,52
Labor Force Participation Rate -LFP'				
Tingkat Pengangguran Terbuka-TP1'	%	10,77	10,52	8,97
Unemployment Rate-UR'				
Penduduk Miskin /'Poor People'	ribu jiwa/ thousand people	31,2	28,8	27,0
Persentase Penduduk Miskin'	%	5,11	4,66	4,39
Percentage of Poor People'				
Indeks Peningkatan Manusia-IPM'	-	79,01	79,69	80,30
Human Development Index'				
<b>EKONOMI/ECONOMIC</b>				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku'	triliun rupiah/ billion rupiah	37,54 <sup>a</sup>	40,50 <sup>a</sup>	43,42 <sup>a</sup>
Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price'				
Laju Pertumbuhan Ekonomi /'Economic Growth'	%	3,92 <sup>a</sup>	5,19 <sup>a</sup>	5,26 <sup>a</sup>
PDRB Per Kapita Harga Berlaku'	juta rupiah/ million rupiah	64,41 <sup>a</sup>	68,55 <sup>a</sup>	72,53 <sup>a</sup>
Per Capita of GRDP at Current Price'				

Gambar 2. Statistik Kunci Kota Cimahi

Sumber: BPS Kota Cimahi (2025)

## 2. Analisis Implementasi Akses Perumahan dan Penanganan Kumuh (SDGs 11.1)

Implementasi Kebijakan pemenuhan akses atas hunian yang layak huni di Kota Cimahi dianalisis berdasarkan kerangka Edwards III, yang menekankan empat variabel utama sebagai penentu efektivitas implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan secara konsisten dari tingkat perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan, serta untuk memahami faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat pencapaian tujuan kebijakan dalam sektor permukiman.

### 1. Aspek Komunikasi

Dalam teori Edwards III, Komunikasi merupakan salah satu hal penting dalam memastikan kebijakan dapat diimplementasikan, keberhasilan kebijakan menuntut kejelasan informasi dan konsistensi data. Temuan di lapangan menunjukkan adanya tantangan dalam sinkronisasi data sasaran. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) mencatat terdapat 2.491 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) berdasarkan penilaian fisik (keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan bangunan). Namun, terdapat perbedaan signifikan dengan data dari Badan Pusat

Statistik (BPS) yang mencatat angka sekitar 24.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) karena memasukkan variabel "keterjangkauan". Perbedaan data ini mengindikasikan adanya hambatan komunikasi lintas sektoral dalam mendefinisikan standar kelayakan hunian, yang berpotensi mempengaruhi ketepatan target intervensi. Meskipun demikian, komunikasi vertikal dari bawah ke atas (bottom-up) berjalan cukup efektif. Dengan adanya mekanisme usulan perbaikan rumah melalui RT/RW dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terbukti mampu menyalurkan aspirasi warga, sebagaimana diakui oleh Ketua RW 04 yang menyatakan bahwa bantuan perbaikan rumah dan infrastruktur lingkungan (septic tank/jalan) telah terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

### 2. Aspek Sumber Daya

Faktor sumber daya, khususnya lahan, menjadi kendala paling utama dalam tantangan yang dihadapi. DPKP mengungkapkan bahwa dari total wilayah Kota Cimahi, terdapat 26% kawasan militer, dan sekitar 30% adalah zona industri. Dan hanya sekitar 30%-an sisanya merupakan wilayah permukiman. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya backlog perumahan, di mana terjadi kesenjangan antara jumlah Kartu Keluarga dengan ketersediaan unit rumah sekitar 34.000 hingga 40.000 unit.

Dari sisi anggaran, DPKP mengandalkan kolaborasi dana dari APBD Kota, Provinsi, dan Pusat (BSPS) dengan nilai bantuan stimulan yang hanya berkisar Rp20-25 juta per unit. Menyadari keterbatasan dana ini, DPKP menerapkan strategi "Dana Swadaya", di mana penerima bantuan diwajibkan memiliki dana pendamping untuk menutupi kekurangan biaya konstruksi. Strategi ini efektif menumbuhkan partisipasi, namun menjadi beban tersendiri bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang sama sekali tidak memiliki swadaya. Implementasi SDGs 11.1 di Cimahi tidak hanya soal memperbaiki Rutilahu, tetapi juga memastikan hunian tidak berada di area negatif list seperti sempadan sungai dan kawasan rawan longsor di Cimahi Utara yang telah dipetakan dalam RP3KP.

### 3. Aspek Disposisi

Komitmen pelaksana kebijakan terlihat sangat kuat melalui berbagai inovasi adaptif. Menghadapi keterbatasan lahan kumuh, DPKP tidak hanya melakukan penataan fisik tetapi juga pemberdayaan sosial-ekonomi melalui program "Cimahi

Luis Bebas Kumuh" (CLBK). Bentuk disposisi positif ini terimplementasi dalam berbagai program seperti Vega Sayang (Vertical Garden Sayuran) yang memanfaatkan dinding sempit di gang kumuh untuk tanaman produktif (sayuran/stroberi) guna ketahanan pangan. Program lainnya adalah Sahabat Gagah & Takara, yaitu inovasi pemanenan air hujan (rainwater harvesting) dan tandon air pemadam kebakaran berbasis masyarakat untuk mengatasi krisis air baku dan risiko kebakaran di kawasan padat yang sulit akses jalan.

### 4. Aspek Birokrasi

Implementasi kebijakan permukiman di Kota Cimahi berjalan dalam koridor struktur birokrasi yang relatif tertata. DPKP memiliki perangkat regulatif dan teknis yang jelas, seperti RP3KP dan RP2KKPK, yang berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan serta pelaksanaan penanganan kumuh. Kejelasan alur kerja ini tercermin dari capaian penurunan luasan kawasan kumuh dari 146,42 hektar berdasarkan SK Kumuh 2021 menjadi 92,93 hektar pada tahun 2024. Meskipun Kota Cimahi menghadapi keterbatasan lahan, kinerja birokrasi dalam mengimplementasikan program penanganan kumuh dapat dikategorikan efektif karena selaras dengan target yang ditetapkan.

Namun demikian, DPKP menekankan bahwa angka Rutilahu maupun kawasan kumuh tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh sifat data yang sangat dinamis, di mana kondisi bangunan dan lingkungan dapat kembali menurun seiring waktu akibat faktor sosial, ekonomi, hingga perilaku pemeliharaan masyarakat. Dengan demikian, struktur birokrasi yang ada harus terus bekerja adaptif untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman secara berkelanjutan.

### 3. Pembahasan Capaian SDGs 11 di Kota Cimahi pada Sektor Pemukiman

Implementasi kebijakan pada sektor permukiman di Kota Cimahi menunjukkan kecenderungan yang lebih progresif dibandingkan sektor lainnya, meskipun tetap berhadapan dengan hambatan struktural seperti keterbatasan lahan, keterbatasan cakupan data kawasan kumuh, serta kapasitas fiskal yang belum sepenuhnya memadai. Keterbatasan ini merupakan karakteristik umum kota-kota dengan kepadatan tinggi dan ruang perkotaan yang sangat terbatas sebagaimana dicatat oleh BPS Kota Cimahi (2025). Meski demikian, hambatan fisik tersebut tidak serta-merta menghambat pelaksanaan kebijakan karena pemerintah daerah mampu menunjukkan kemampuan beradaptasi melalui berbagai pendekatan inovatif.

Salah satu faktor yang memperkuat implementasi kebijakan permukiman adalah disposisi pelaksana, yaitu komitmen dan kemauan birokrasi untuk menjalankan program secara konsisten. Hal ini sejalan dengan teori implementasi Edwards III (1980) yang menegaskan bahwa disposisi aparat menjadi salah satu determinan utama keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks Cimahi, komitmen ini tercermin dari upaya pemerintah mendorong inovasi penanganan kawasan kumuh berbasis sosial dan lingkungan, bukan hanya sekadar pembangunan fisik.

Inovasi tersebut diwujudkan melalui pengembangan hunian vertikal, urban farming, serta pendekatan pemberdayaan masyarakat yang semakin digencarkan sebagaimana diarahkan dalam

RP3KP Kota Cimahi (Disperkim, 2023). Program hunian vertikal menjadi solusi jangka panjang bagi kota dengan keterbatasan ruang horizontal, sementara urban farming berfungsi sebagai strategi multifungsi: meningkatkan kualitas lingkungan, memperbaiki estetika kawasan, serta menyediakan akses pangan skala komunitas. Pendekatan pemberdayaan masyarakat juga membuat warga menjadi aktor aktif dalam perbaikan kualitas lingkungan tempat tinggalnya.

Pergeseran kebijakan dari pola lama yang berfokus pada pembangunan fisik menuju pendekatan yang lebih holistik menggambarkan transformasi paradigma pembangunan. Sebagaimana dikemukakan Budihardjo & Sujarto (1998), pembangunan kota berkelanjutan tidak dapat hanya bertumpu pada perbaikan fisik, tetapi juga harus menyentuh aspek sosial-ekonomi masyarakat. Pemerintah Cimahi terlihat mengadopsi prinsip ini melalui integrasi program perumahan dengan kegiatan peningkatan ekonomi komunitas seperti pelatihan keterampilan warga, pemanfaatan ruang publik, serta program kolaboratif berbasis komunitas.

Adaptasi strategi ini juga menunjukkan bahwa birokrasi daerah memiliki kapasitas untuk melakukan policy innovation, terutama ketika beroperasi di bawah berbagai keterbatasan struktural. Hal ini sejalan dengan pemikiran McConnell dan 't Hart (2019) yang menjelaskan bahwa kegagalan dalam kebijakan publik tidak selalu terjadi karena tidak adanya tindakan, tetapi sering kali karena tindakan yang tidak adaptif. Dengan mengembangkan pendekatan kreatif seperti hunian vertikal dan urban farming, pemerintah Cimahi telah menunjukkan kecenderungan melakukan tindakan adaptif yang memperkuat efektivitas kebijakan.

Selanjutnya, implementasi kebijakan permukiman di Cimahi juga dipengaruhi oleh kerangka regulasi nasional, salah satunya Permen PUPR No. 14 Tahun 2018 yang mengamanatkan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh melalui pendekatan terpadu. Regulasi ini memberi dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk merancang program inovatif sekaligus memperkuat integrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Dengan demikian, kebijakan permukiman di Cimahi tidak berjalan secara parsial, tetapi berada dalam koridor pembangunan berkelanjutan sebagaimana ditekankan oleh Bappenas (2020).

Secara keseluruhan, strategi yang digunakan pemerintah Kota Cimahi mencerminkan model pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan berbagai dimensi: fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai tantangan struktural masih dihadapi, pemerintah mampu mengoptimalkan kapasitas internal melalui inovasi dan pemberdayaan komunitas. Oleh karena itu, upaya transformasi menuju lingkungan permukiman yang layak dan berkelanjutan menjadi lebih realistik diwujudkan, serta mendukung pencapaian tujuan SDGs 11.1 mengenai permukiman layak.

Tabel 2. Sektor Pemukiman

Variabel Edwards III	Sektor Permukiman
Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arahan dan tujuan kebijakan relatif jelas serta tersampaikan ke pelaksana melalui program penanganan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman.</li> <li>• Sosialisasi berjalan cukup baik karena melibatkan RT/RW, kelurahan, dan masyarakat penerima manfaat.</li> <li>• Pesan kebijakan lebih mudah diterima karena masalah (kumuh) terlihat secara fisik.</li> </ul>
Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan lahan menjadi hambatan besar, namun diatasi melalui inovasi hunian vertikal dan pemanfaatan ruang terbatas.</li> <li>• Dukungan anggaran relatif tersedia melalui program pusat/DAK serta kolaborasi dengan komunitas lokal (urban farming).</li> <li>• Kapasitas SDM pelaksana cukup stabil.</li> </ul>
Disposisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposisi pelaksana kuat dan progresif: pemerintah daerah mendorong inovasi sosial dan transformasi pendekatan dari fisik ke sosial-ekonomi.</li> <li>• Pelibatan masyarakat tinggi, sehingga pelaksana lebih</li> </ul>

	termotivasi.
Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur program relatif jelas dengan SOP penanganan kumuh yang terintegrasi.</li> <li>• Mekanisme koordinasi antarlevel pemerintahan cukup terbangun.</li> </ul>

Sumber: Data Diolah (2025)

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi SDGs 11 di Kota Cimahi pada sektor permukiman, dapat disimpulkan bahwa pemerintah kota telah menunjukkan capaian yang cukup efektif dalam memenuhi indikator 11.1 terkait akses terhadap hunian layak dan penanganan kawasan kumuh. Melalui program-program yang dijalankan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), program Cimahi Luis Bebas Kumuh (CLBK), serta pengembangan vertical garden, pemerintah berhasil menurunkan luasan kawasan kumuh secara signifikan dari tahun 2021 hingga 2024. Keberhasilan ini dicapai meskipun dihadapkan pada keterbatasan lahan serta sumber daya, dan diperkuat oleh kolaborasi dengan masyarakat yang berperan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.

Efektivitas implementasi SDGs 11 pada sektor permukiman juga didukung oleh tata kelola yang relatif solid, komunikasi antaraktor yang cukup baik, serta disposisi pelaksana yang adaptif dalam menghadapi berbagai hambatan teknis maupun administratif. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan, seperti harmonisasi data terkait Rutilahu serta peningkatan koordinasi dengan lembaga pendukung lainnya agar perencanaan dan pelaksanaan program lebih terarah. Secara keseluruhan, implementasi SDGs 11 pada sektor permukiman di Kota Cimahi menunjukkan arah yang positif dan berpotensi terus berkembang menuju kota yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan apabila penguatan sumber daya, konsistensi koordinasi, dan perlibatan masyarakat tetap diprioritaskan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Cimahi. (2025). Kota Cimahi dalam Angka 2025. Cimahi: BPS Kota Cimahi.
- Badan Pusat Statistik Kota Cimahi. (2025). Luas Wilayah Kota Cimahi (2022). Cimahi: BPS Kota Cimahi.
- Bappenas. (2020). Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Jakarta: Bappenas.
- Creswell, J. W. (2019). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi ke-4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi. (2023). RP3KP Kota Cimahi: Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Cimahi: Disperkim.
- Edwards, G. C. III. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Hadi, W. (2012). Sustainable Development (Pengembangan Berkelanjutan).
- Budihardjo, E., & Sujarto, D. (1998). Kota Berkelanjutan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. (2018).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. (2017).